

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur :

- Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik (Filsafat – Paradigma – Teori – Tujuan – Strategi Dan Komunikasi Politik Indonesia)*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- _____. 2006. *Pencitran Dalam Politik (Strategi Pemenangan Pemilu Dalam Prespektif Komunikasi Politik)*. Pustaka Indonesia. Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Efriza. 2012. *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. CV. Alfabeta. Bandung.
- E. Koswara. 2001. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Pariba. Jakarta.
- Fakrulloh, dkk. 2004. *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan Jalan*. CV. Cipruv. Jakarta.
- Haryanto. 1984. *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*. Liberty. Yogyakarta.
- Hertanto, dkk. 2002. *Pemilihan Umum 1999 Di Lampung*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Istyanto, Doni. 2011. *Hegemoni Jawa Dalam Pilpres Melalui Suara Terbanyak Dengan Prinsip Satu Orang Satu Suara Satu Nilai*. ADN Consult. Surabaya.
- Kansil, C.S.T. 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Laila, Hasyim. 1994. *Partai Politik Dan Kelompok-Kelompok Penekan*. Bina Aksara. Yogyakarta.
- Nasution, Zulkarimein. 1990. *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sarwoto. 2008. *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*. Jakarta. Ghalia Indonesia

Sembiring, Sentosa. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Pemerintahan Daerah (Pemda)*. Nuansa Aulia. Bandung.

Soemantri, Trisantono B. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Fokus Media. Bandung.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1989. *Metode Penelitian*. Jakarta. Pustaka Media.

Shadily, Hassan. 2003. *Kamus Bahasa Inggris, An English-Indonesian Dictionary (Webster's Third New International Dictionary)*. PT. Gramedia. Jakarta.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen dilengkapi Profile Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.